

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Dwi Ratmono (2015) akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal”.

Sujarweni (2015) “Menyatakan akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan dala, pengelolaan dana publik pada lembaga tertinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya”.

Menurut Mardiasmo (2018) "Akuntansi sektor publik mengacu pada lingkungan informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah karena memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Bastian, Indra (2019) "Akuntansi Sektor Publik ialah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Pemerintah Daerah BUMN, BUMD, LSM, dan Yayasan Sosial maupun proyek-proyek kena sama sektor publik dan sektor swasta”.

Secara umum, khususnya dalam dunia akuntansi di negara maju, organisasi sektor publik terbagi menjadi tiga kelompok utama yaitu:

1. Pemerintah pusat terdiri dari beberapa departemen dan lembaga di bawah pemerintah eksekutif
2. Industri atau perusahaan yang memiliki kepentingan publik, serta bagi masyarakat luas
3. Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

Sektor publik secara keseluruhan berkaitan dengan kepentingan publik dan penyediaan layanan yang ditujukan untuk masyarakat umum, dan didanai oleh

pajak dan sumber daya negara lainnya yang diatur oleh undang-undang yang sesuai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan kegiatan pada bidang keuangan guna untuk menjamin kebutuhan dan hak masyarakat umum melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### **2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Berdasarkan *American Accounting Assosiation* (1970), akuntansi sektor publik memiliki tujuan yaitu (Madjid, 2019):

#### **1. Kontrol Manajemen (*Management Control*)**

Tujuan konsultasi manajemen adalah untuk memberikan informasi tentang operasi dan penggunaan sumber daya organisasi secara cepat, efisien, akurat dan ekonomis, berdasarkan kebutuhan manajemen organisasi.

#### **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Memberikan informasi yang menguntungkan bagi manajer publik. Dapat diketahui bahwa dalam memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan pada tanggung jawab penggunaan sumber daya atau setiap bagian berada dibawah tanggung jawab manajer. Melalui akuntansi sektor publik dapat melaporkan kegiatan maupun penggunaan dana atau anggaran publik.

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk menjelaskan berbagai jenis informasi yang berguna dalam melaksanakan akuntabilitas dan merumuskan kebijakan yang tepat sejalan dengan kerangka konseptual akuntan publik. Tujuan yang dapat diketahui dalam akuntansi sektor publik adalah senagai berikut:

1. Menyediakan data sumber, alokasi dan implementasi potensi keuangan
2. Memberikan data yang berhubungan dengan kesesuaian pendapatan dalam periode berjalan sebagai pembelanjaan seluruh pengeluaran
3. Memberikan informasi semua potensi ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan

Memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang cocok dengan keadaan organisasi sehingga menggambarkan kondisi keuangan sesuai dengan penerimaan dalam jangka waktu yang relative pendek ataupun dalam jangka panjang.

### 2.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018), Akuntansi sektor publik ini memiliki karakteristik yang cukup unik dan menarik karena akuntansi sektor ini biasanya hanya digunakan oleh Lembaga publik atau pemerintah dimana dalam kegiatan operasional tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk melayani publik. Dengan tujuan utama bukan mencari keuntungan tetapi memberikan pelayanan kepada publik dalam hal ini masyarakat maka dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, maka akuntansi sektor publik dituntut untuk transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pelaporannya. Oleh sebab itu, akuntansi sektor publik sering dijadikan sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi merupakan komponen yang ada dalam organisasi atau Lembaga sektor publik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu lingkungan yang bergerak mengelilingi sektor public ini sangat kompleks dan kacau, tidak bisa serta merta kita menyelesaikan dengan mudah dan hal ini sangat beda dengan sektor swasta. Berikut ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi dan situasi akuntansi sektor publik.

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Tingkat inflasi
- c. Pertumbuhan pendapatan per kapita
- d. Struktur produksi
- e. Tenaga kerja
- f. Arus modal dalam negeri
- g. Cadangan devisa
- h. Nilai tukar mata uang
- i. Utang dan bantuan luar negeri
- j. Infrastruktur
- k. Teknologi
- l. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
- m. Sektor informal

#### 1. Faktor Politik

Faktor politik yang memengaruhi sektor publik anatara lain:

- a. Hubungan negara dan masyarakat
- b. Legitimasi pemerintah
- c. Tipe rezim yang berkuasa
- d. Ideologi negara
- e. Elit politik dan massa
- f. Jaringan internasional
- g. Kelembagaan

## 2. Faktor Kultural

Faktor kultural yang memengaruhi organisasi sektor public antara lain:

- a. Keragaman suku, ras, agama, Bahasa, dan budaya
- b. Sistem nilai di masyarakat
- c. Historis
- d. Sosiologi masyarakat
- e. Karakteristik masyarakat
- f. Tingkat Pendidikan

## 3. Faktor Demografi

Faktor demografi yang memengaruhi organisasi sektor public antara lain:

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Struktur usia penduduk
- c. Migrasi
- d. Tingkat kesehatan

### 2.1.4. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta

Pengertian sektor publik dapat kita ketahui dengan membandingkan sektor publik dengan sektor swasta. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang bisa dibandingkan antara keduanya.

Beberapa kesamaan antara sektor publik dan sektor swasta adalah sebagai berikut:

1. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisah dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya dalam sistem perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Keduanya juga saling melakukan bisnis bersama dan saling membutuhkan

2. Keduanya memiliki sumber daya keuangan yang terbatas untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, keduanya harus mengatur keuangannya dengan baik.
3. Keduanya memiliki model pengelolaan keuangan yang sama dari perencanaan hingga pengendalian, tetapi dalam hal ini penggunaan akuntansi diperlukan
4. Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan angkutan umum, sementara ada juga perusahaan swasta yang menyediakan angkutan umum untuk umum.

Sementara itu, berikut ini adalah perbedaan secara umum yang dapat membedakan sektor publik dengan sektor swasta secara signifikan :

Tabel 2.1  
Perbedaan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta

<b>Perbedaan</b>	<b>Sektor Publik</b>	<b>Sektor Swasta</b>
Tujuan organisasi	<i>Nonprofit</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber pendanaan	Perpajakan, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dsb	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (public) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan Hiperarkis	Fleksibel, datar, pyramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	– <i>Cash basis</i> – <i>Cash Toward Accrual/Cash Transitioning to Accrual</i>	<i>Accrual basis</i>

	– <i>Accrual Basis</i>	
--	------------------------	--

Sumber : Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018)

Tabel 2.2

Perbedaan Stakeholder sektor publik dengan sektor swasta

<i>Stakeholder</i> Sektor Publik	<i>Stakeholder</i> Sektor Swasta
<p><i>Stakeholder</i> Eksternal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat pengguna jasa publik</li> <li>• Masyarakat pembayar pajak</li> <li>• Perusahaan serta organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai kontribusi untuk operasi organisasi</li> <li>• Bank sebagai kreditur pemerintah</li> <li>• Badan-badan internasional</li> <li>• Investor asing dan <i>Country Analyst</i></li> <li>• Generasi yang akan datang</li> </ul>	<p><i>Stakeholder</i> Eksternal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank sebagai kreditur</li> <li>• Serikat buruh</li> <li>• Pemerintah</li> <li>• Pemasok</li> <li>• Distributor</li> <li>• Pelanggan</li> <li>• Masyarakat</li> <li>• Serikat dagang</li> <li>• Pasar modal</li> </ul>
<p><i>Stakeholder</i> Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga negara</li> <li>• Kelompok politik</li> <li>• Manajer publik</li> <li>• Pegawai pemerintah</li> </ul>	<p><i>Stakeholder</i> Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen</li> <li>• Karyawan</li> <li>• Pemegang saham</li> </ul>

Sumber : Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018)

## 2.2 *Value for Money*

### 2.2.1 Pengertian *Value for Money*

*Value for Money* adalah sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for Money* yaitu indikator kinerja suatu sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dikeluarkan menciptakan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.

Menurut Arisaudi (2016) “*Value for money* merupakan tolak ukur dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.”

Menurut Mardiasmo (2016) “*Value for Money* sebagai penghargaan terhadap nilai uang, hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak

dan digunakan sebaik-baiknya. *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara Bersama sehingga benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya.”

Halim et al. (2014) “*Value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi, yaitu ekonomi terkait sejauh mana organisasi sektor publik meminimalisir *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi terkait pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu dan efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.”

### **2.2.2 Indikator Value for Money**

#### **1. Indikator Alokasi Biaya (Ekonomis dan Efisiensi)**

Ekonomi adalah praktik membeli barang dan jasa dengan kualitas tertentu dan dengan harga terbaik. Ekonomi memiliki arti yaitu memperoleh sumber daya dengan harga terendah sehingga mendekati harga pasar. Penghematan dalam ekonomi sering untuk merujuk pada manajemen atau perhatian yang hati-hati untuk mencegah pemborosan. Kegiatan operasional yang dilakukan dapat dikatakan ekonomis jika dapat melakukan penghematan dengan menghilangkan atau mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu.

Efisiensi adalah produk atau hasil kerja tertentu yang dicapai dengan penggunaan sumber daya atau sumber daya yang seminimal mungkin. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien jika dapat menghasilkan *output* tertentu dengan jumlah input yang minimum atau *output* yang maksimum dengan *input* tertentu.

#### **2. Indikator Kualitas Pelayanan (Efektivitas)**

Efektivitas adalah proses suatu kegiatan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu kebijakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dapat dinyatakan efektif apabila *output* yang dicapai dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

### **2.2.3 Manfaat Value For Money**

*Value for Money* memiliki manfaat yang penting bagi pengukuran kinerja suatu organisasi sektor publik. *Value for Money* dapat meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. Hingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang efisien, ekonomis dan efektif.

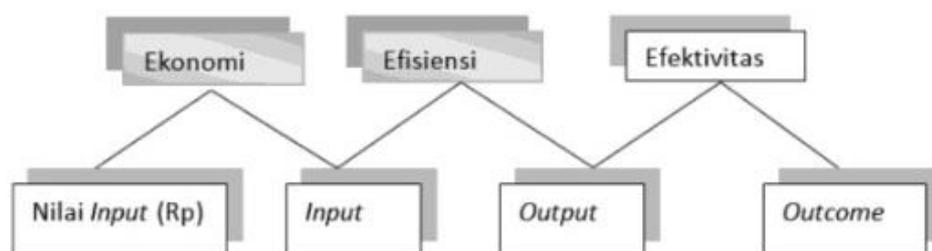
Implementasi analisis *Value for Money* dipercaya dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut ini.

1. Efektivitas pelayanan publik

Meningkakan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan tujuan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mengurangi biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu, dan
5. Meningkatkan kesadaran akan dana publik (*public cost awareness*) sebagai dasar untuk melaksanakan tanggung jawab publik.

Secara skematis pengukuran kinerja organisasi sektor publik berdasarkan konsep *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema *Value for Money*

Sumber : Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018)

#### **2.2.4 Tujuan *Value for Money***

Tujuan utama dari *value for money* adalah untuk menjamin akuntabilitas publik oleh lembaga keuangan kepada publik yang sering disebut sebagai akuntabilitas publik. Ada beberapa tujuan lain yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas layanan publik, yang artinya pelayanan pada tepat sasaran
2. Meningkatkan standar pelayanan publik
3. Mengurangi biaya layanan publik yang disebabkan oleh in-efisiensi dan penghematan terhadap penggunaan input
4. Alokasi belanja yang berorientasi penggunaan input
5. Meningkatkan pemahaman akan uang publik sebagai sumber dalam penerapan akuntabilitas pada publik.

#### **2.2.5 Konsep Pengukuran *Value for Money***

Pengukuran berdasarkan konsep *value for money* ditinjau dari ekonomis, efisien, dan efektivitas yaitu sebagai berikut :

1. Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2016) Ekonomis yaitu perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomis adalah perbandingan antara sumber daya dan biayanya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan atau menghemat konsumsi sumber daya dengan menghindari pemborosan pengeluaran.

Suatu operasi dapat dikatakan ekonomis jika menghilangkan atau mengurangi pengeluaran biaya yang tidak perlu. Menggunakan sumber daya sesuai anggaran menunjukkan adanya penghematan, sementara menggunakan sumber daya di luar anggaran menunjukkan adanya pemborosan.

Mahmudi (2016) "Ekonomis adalah terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Tingkat ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja."

Adapun rumus untuk mengukur ekonomis dalam penilaian kinerja yaitu :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Kriteria Ekonomis

Persentase Kinerja	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Dibawah 60%	Tidak Ekonomis

Menurut Beni Pekei (2016), kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis.
- b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.
- c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup ekonomis.
- d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak ekonomis.

## 2. Efisiensi

Efisiensi mempunyai arti yang berhubungan erat kaitannya dengan produktivitas. Pengukuran efisiensi ini dilakukan dengan cara membandingkan *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan.

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah mungkin.

Menurut Renyowijoyo (2013) “juga menyebutkan bahwa efisiensi merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Semakin besar output dibandingkan pada input, maka semakin tinggi pula tingkat capaian efisiensi pada suatu organisasi.”

Adapun rumus untuk mengukur efisiensi dalam penilaian kinerja yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Kriteria Efisiensi

Persentase Kinerja	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Menurut Beni Pekei (2016), kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

### 3. Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target suatu organisasi. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan atau sasaran akhir kebijakan.

Mardiasmo (2018) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan. Mardiasmo dalam Aulia (2014) juga menyatakan bahwa efektivitas merupakan gambaran dari hasil tingkat pencapaian pada program/kegiatan yang sudah ditargetkan."

Adapun rumus untuk mengukur efektivitas dalam penilaian kinerja yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria Efektivitas dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5

Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Menurut Beni Pekei (2016), kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

## **2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut Rudianto (2013) “Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya sehingga kinerja keuangan menjadi hal yang paling penting untuk dicapai setiap perusahaan”.

Menurut Wibowo (2014) “Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja perusahaan (*organizational performance*) merupakan seberapa efisien dan efektif sebuah perusahaan atau seberapa baik perusahaan itu mencapai tujuannya”.

Menurut Sabil (2016) “Kinerja keuangan merupakan tolak ukur bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Besar kecilnya kinerja yang dicapai tergantung pada kinerja manajemen perusahaan baik dari masing-masing individu maupun kelompok dalam perusahaan tersebut. Dengan rasio keuangan dapat membantu perusahaan menilai apakah kinerja keuangan sudah sesuai dengan yang diharapkan perusahaan ataukah belum”.

Menurut Hery (2018) “Pengukuran kinerja keuangan adalah upaya formal untuk menilai efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalakan sumber daya yang dimilikinya”.

### **2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Tujuan pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui karena pengukuran kinerja dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Untuk itu, manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi kesehatan perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan dan tujuan pengukuran kinerja keuangan. Ada empat tujuan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Munawir (2014) yakni untuk:

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi segera setelah penagihan,
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan tersebut meliputi keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya secara stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dan membayar bunga hutangnya tepat waktu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan asset perusahaan oleh manajemen dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan Tindakan perbaikan atas kinerja keuangan yang tidak sehat.

### **2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut Sujarweni (2017) berikut ini manfaat dari kinerja keuangan, yaitu:

1. Untuk mengukur pencapaian yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama periode waktu tertentu
2. Untuk menilai pencapaian masing-masing departemen dalam memberikan kontribusi terhadap perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai landasan untuk menentukan strategi masa depan perusahaan .
4. Memberikan arahan untuk pengambilan keputusan dan jalannya organisasi pada umumnya dan untuk unit atau bagian organisasi pada khususnya .
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan investasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

### **2.3.4 Kategori Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan dapat diukur menggunakan sejumlah alat analisis. Secara teknis, menurut Jumingan (2018), analisis keuangan dapat dibagi menjadi delapan kategori:

1. Analisis laporan keuangan komparatif  
Analisis laporan keuangan komparatif adalah metode analisis membandingkan keuangan untuk dua periode atau lebih, yang menunjukkan perubahan total (absolut) dan rasio (relatif).
2. Analisis tren (tendensi posisi)  
Analisis tren adalah teknik analisis yang mengonfirmasi tendensi naik atau turunnya kondisi suatu keuangan
3. Analisis persentase berdasarkan komponen (*common size*)  
Analisis persentase berdasarkan komponen adalah teknik analisis yang menentukan persentase investasi terhadap total aktiva dan kewajiban
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja  
Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah teknik analisis yang mengidentifikasi sumber dan penggunaan modal kerja dengan membandingkan dua periode waktu.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas  
Analisis sumber dan penggunaan kas adalah teknik analisis untuk menentukan dimana kas berada dalam periode waktu tertentu dan alasan perubahan kas.
6. Analisis rasio keuangan  
Analisis rasio keuangan adalah teknik analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu di neraca dan laporan laba rugi, baik individual maupun saat yang bersamaan.
7. Analisis perubahan laba kotor  
Analisis perubahan laba kotor adalah teknik analisis untuk menentukan posisi laba dan alasan perubahan laba.
8. Analisis *Break Even*  
Analisis *break even* adalah teknik analisis yang menentukan berapa banyak penjualan yang harus dihasilkan perusahaan tanpa menimbulkan kerugian.

### **2.3.5 Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah harus meliputi pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Mahsun (2017) menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai secara langsung melalui suatu kegiatan, yang dapat bersifat fisik maupun non fisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terhubung dengan tujuan kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya, tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat

6. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah efek yang dihasilkan, baik maupun buruk. Misalnya: pertumbuhan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.